

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DAN PELAKSANAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)  
TERHADAP NILAI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN SKPD  
(Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Bukittinggi)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Persyaratan Menyelesaikan Program Studi Sarjana Ekonomi  
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh

**VIONE ERIKA**  
2006/73445

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2011**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

JUDUL : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DAN PELAKSANAAN  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)  
TERHADAP NILAI INFORMASI LAPORAN  
KEUANGAN SKPD

NAMA : VIONE ERIKA

BP/NIM : 2006/73445

KEAHLIAN : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

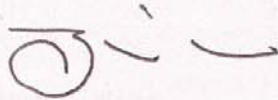
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Februari 2011

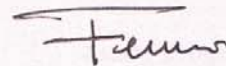
Disetujui Oleh :

Pembimbing I



**Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak**  
NIP. 19580519 199001 1 001

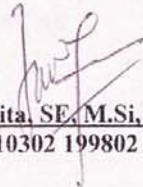
Pembimbing II



**Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**  
NIP. 19739213 199903 1 003

Mengetahui,

Ketua Prodi Akuntansi



**Lili Anita, SE, M.Si, Ak**  
NIP. 19710302 199802 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

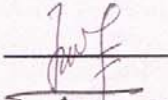
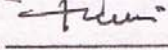
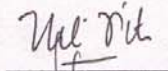
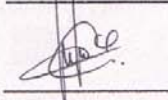
*Dinyatakan Lulus  
Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  
dan Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)  
terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD**

Nama : Vione Erika  
BP/NIM : 2006/73445  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2011

Tim Penguji

No. Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Lili Anita, SE, M.Si Ak	1. 
2. Sekretaris	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	2. 
3. Anggota	Nelvirita, SE, M.Si, Ak	3. 
4. Anggota	Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	4. 

## ABSTRAK

**Vione Erika (73445) : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD . Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2011.**

**Pembimbing : 1. Dr. H. Efrizal Syofyan, S.E, M.Si, Ak  
2. Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD (2) Pengaruh pelaksanaan standar akuntansi pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD (3) Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD melalui pelaksanaan standar akuntansi pemerintah

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD di kota Bukittinggi. Teknik pengambilan sampelnya yaitu *total sampling*. Analisis data menggunakan *path analysis*.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: (1) sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD, dimana nilai signifikansi  $0,010 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,814 > 1,7139$  ( $H_1$  diterima). (2) pelaksanaan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD, dimana nilai signifikansi  $0,043 < 0,05$  dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,140 > 1,7139$  ( $H_2$  diterima). (3) sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD melalui pelaksanaan standar akuntansi pemerintah dimana nilai signifikansi  $0,010 < 0,05$  dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,793 > 1,7139$  ( $H_3$  diterima)

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi seluruh instansi pemerintah kota Bukittinggi agar dapat meningkatkan sistem pengendalian intren pemerintah dan pelaksanaan standar akuntansi pemerintah. Bagi penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik survei dan wawancara langsung terhadap responden untuk dapat menggali semua hal yang menjadi tujuan penelitian.

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, S.E, M.Si, Ak sebagai pembimbing I dan Bapak Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc, Ak sebagai pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.

5. Mama,Papa dan adik serta seluruh keluarga besar penulis atas kasih sayang dan bantuan moril dan materil.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini, terutama teman-teman Program Studi Akuntansi Angkatan 2006.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian berikutnya akan menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis barharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Padang, Februari 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi masalah.....	7
C. Pembatasan masalah.....	8
D. Perumusan masalah .....	8
E. Tujuan penelitian .....	9
F. Manfaat penelitian .....	9
<b>BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN</b>	
<b>HIPOTESIS</b>	
A. Kajian Teori	
1. Nilai Informasi Lapran Keuangan SKPD .....	10
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	24
3. Standar Akuntansi Pemerintah.....	34
B. Penelitian Relevan .....	41

C. Kerangka konseptual.....	42
D. Hipotesis .....	44

**BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	45
B. Populasi dan Sampel .....	45
C. Jenis Data dan Sumber Data .....	48
D. Metode Pengumpulan Data.....	48
E. Variabel Penelitian .....	48
F. Instrumen Penelitian.....	49
G.Uji Validitas dan Reliabilitas.....	51
H. Hasil Uji Coba Instrumen .....	53
I. Uji Asumsi Klasik .....	54
J.Teknik Analisis Data.....	55
K.Definisi Operasional .....	60

**BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	62
B. Demografi Responden .....	63
C. Uji Valid dan Reliabilitas.....	66
D. Uji Asumsi Klasik.....	68
E. Deskripsi Variabel Penelitian.....	70
F. Analisis Data .....	77
G. Pengujian Hipotesis .....	81
H. Pembahasan .....	84



**BAB V.PENUTUP**

A. Kesimpulan .....91

B. Keterbatasan dan Saran Penelitian.....91

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Daftar SKPD.....	46
2. Skala Pengukuran .....	50
3. Instrumen Penelitian .....	50
4. Nilai <i>Cronbach's Alpha &amp; Corrected Item Total Correlation</i> .....	53
5. Tingkat Pengembalian Responden .....	62
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	63
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	64
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan .....	65
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja .....	66
10. Nilai <i>Corrected Item Total Correlation</i> terkecil .....	67
11. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> .....	67
12. Uji Normalitas .....	69
13. Uji Heterokedastisitas.....	70
14. Distribusi Frekuensi Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	71
15. Distribusi Frekuensi Variabel Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah	73
16. Distribusi Frekuensi Variabel Nilai Informasi Laporan Keuangan.....	75
17. Koefisien Determinasi Substruktur 1 .....	77
18. Koefisien Regresi Substruktur 1 .....	77
19. Koefisien Determinasi Substruktur 2 .....	79
20. Koefisien Regresi Substruktur 2.....	79

21. Rekapitulasi Pengaruh Variabel Penyebab terhadap Variabel Akibat .....	81
22. Uji F.....	82

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Konseptual .....	44
2. Struktur Lengkap Antar Variabel.....	56
3. Substruktur 1: Pengaruh $X_1$ terhadap $X_2$ .....	57
4. Substruktur 2: Pengaruh $X_1$ dan $X_2$ terhadap $Y$ .....	57
5. Substruktur 2: Pengaruh $X_1$ terhadap $X_2$ .....	78
6. Substruktur 2: Pengaruh $X_1$ dan $X_2$ terhadap $Y$ .....	80

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Kuesioner Penelitian .....	95
2. Tabel Distribusi Frekuensi Skor Variabel.....	101
2. Hasil Analisis Validitas dan Realibilitas <i>Pilot Test</i> .....	107
3. Hasil Analisis Validitas dan Realibilitas Penelitian.....	110
4. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	113
5. Analisis Data .....	114
6. Pengujian Hipotesis.....	115

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sejalan dengan terus bergulirnya reformasi, pemerintah pusat mengantisipasinya dengan mengeluarkan paket kebijakan bagi perubahan penyelenggaraan pemerintah daerah. Perubahan peranan dari lembaga pemerintah daerah adalah pelayanan publik (*public service*) secara efektif dan efisien melalui otonomi daerah. Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No 32/2004). Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang merupakan limpahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemberlakuan otonomi daerah merupakan salah satu bentuk perwujudan dari reformasi keuangan negara dan daerah.

Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah

perubahan di bidang akuntansi pemerintahan, karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan yang paling diinginkan adalah adanya standar akuntansi pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Menurut Suwardjono (2005) tujuan utama dalam laporan keuangan organisasi non bisnis seperti unit-unit pemerintahan yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan harus mempunyai nilai agar dapat dimanfaatkan oleh pemakai laporan keuangan. Nilai informasi laporan keuangan merupakan kebermanfaatan informasi dalam penyajian

laporan keuangan sehingga dapat digunakan oleh pemakai dalam pengambilan keputusan.

Untuk mengukur nilai informasi dalam laporan keuangan maka dibutuhkan suatu bentuk karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Menurut FASB (dalam Suwardjono, 2005 ) karakteristik kualitatif ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu primer dan sekunder. Kualitas primer terdiri atas kerelevanan dan keterandalan, sedangkan kualitas sekunder terdiri atas keterbandingan, konsistensi dan netralitas. Dengan adanya karakteristik kualitatif ini maka diharapkan akan tercapai penyajian informasi keuangan yang memiliki kebermanfaatan oleh para pemakainya.

Harus disadari banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Mardiasmo (2002) mengidentifikasi sepuluh pemakai laporan keuangan pemerintah, yaitu (1) pembayar pajak (*tax payer*), (2) pemberi dana bantuan (*grantors*), (3) investor, (4) pengguna jasa (*fee-paying service recipients*), (5) karyawan/ pegawai, (6) pemasok (*vendors*), (7) dewan legislative, (8) manajemen, (9) pemilih (*voters*) (10) badan pengawas (*oversigh*). Sehingga dengan adanya pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini maka diharapkan laporan keuangan tersebut mampu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan oleh para pemakainya.

Menurut Wahyono, 2004 (dalam Harifan, 2009) informasi harus dapat dipahami sebagai salah satu indikator berkualitasnya suatu informasi. Mudah dipahami disini menyangkut sumber manusia yang menghasilkannya. Sumber daya manusia



pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya di bidang akuntansi.

Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya, akan tetapi selain mempunyai kewenangan pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayanya tersebut.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan dari laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Pemenuhan tujuan laporan keuangan tersebut akan bermanfaat, berkualitas dan dapat memenuhi tujuannya jika memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu: dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*).

Wahyono (2004) kriteria lain nilai informasi yang dapat dipahami adalah akurat dan andal. Untuk mencapai informasi yang akurat diperlukan komponen pengendalian/ kontrol. Sistem informasi sudah menjadi satu kesatuan dari proses

akuntansi, mulai dari akuntansi keuangan, audit dan saat ini sampai pada sistem pengendalian sehingga akuntansi diharapkan mampu memproses serta menghasilkan data keuangan dan non keuangan menjadi suatu informasi yang dapat digunakan (bernilai) untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau kata lain nilai akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengendalian Intern meliputi berbagai kebijakan dan prosedur yaitu, (1) terkait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAP, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, tujuan dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah 1) memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, 2) keandalan pelaporan keuangan, 3) pengamanan aset negara, 4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 menyatakan bahwa, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi

Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 ayat (1), menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) untuk laporan keuangan kota Bukittinggi adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun Badan Anggaran (Bangar) DPRD Bukittinggi menanyakan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bukittinggi TA 2009. Dalam LKPD Bukittinggi tersebut BPK menemukan ketidakjelasan penggunaan dana pada Dinas Pengelolaan Pasar sebesar Rp. 3,6 miliar dan penyertaan modal Pemko Bukittinggi ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp. 1,8 miliar. Selain itu, hasil temuan BPK lainnya terkait LKPD Bukittinggi yang diduga merugikan keuangan Negara yaitu penggunaan anggaran pada Dinas Pendidikan sebesar Rp. 162 juta, Sekretariat DPRD sebesar Rp. 70 juta dan sejumlah asset Pemko Bukittinggi tidak memiliki sertifikat. (*sumber indowarta 22 juli 2010*).

Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan Siska (2009) tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif penerapan standar akuntansi pemerintah dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan peneliti sebelumnya terletak pada fokus penelitian yaitu nilai informasi laporan keuangan. Dan melakukan penelitian di SKPD yang ada di kota Bukittinggi. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD”**(Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Bukittinggi).

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka diidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

1. Sejauhmana pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD?
2. Sejauhmana penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah?
3. Apakah penyusunan laporan keuangan pada pemerintah telah berstandar pada Peraturan Pemerintah yang berlaku?

4. Sejauhmana pengaruh pelaksanaan standar akuntansi pemerintahan terhadap nilai informasi laporan keuangan daerah?
5. Kendala-Kendala apa yang dihadapi oleh Pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berstandar pada SAP?

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi yang diungkapkan di atas maka peneliti akan membatasi masalah hanya pada pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pelaksanaan standar akuntansi pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauhmana sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD?
2. Sejauhmana pelaksanaan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD?
3. Sejauhmana sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap pelaksanaan standar akuntansi pemerintah?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD.
2. Pengaruh pelaksanaan standar akuntansi pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD.
3. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pelaksanaan standar akuntansi pemerintah.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan pelaksanaan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah dan nilai informasi laporan keuangan.
2. Bagi Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi dapat lebih memperhatikan sistem pengendalian internalnya dan standar akuntansi pemerintah.
3. Bagi akademis menambah sebuah bukti empiris dan ilmu pengetahuan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD sehingga dapat menjadi masukan dalam penelitian yang sejalan dengan ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD**

###### **a. Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan Daerah selama suatu periode. Sedangkan Bastian (2006) mendefenisikan laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas.

**b. Faktor yang Mempengaruhi Sifat dan Isi Laporan Keuangan**

Menurut Wild (2005), faktor yang mempengaruhi sifat dan isi laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (GAAP)
- 2) Motivasi manajer
- 3) Mekanisme pengawasan dan pelaksanaan
- 4) Badan pengatur
- 5) Sifat industri
- 6) Sumber informasi lainnya

**c. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota**

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota terdiri dari:

- 1) Pendahuluan

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

- 2) Peranan dan tujuan pelaporan keuangan
  - a) Peranan pelaporan keuangan



Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah selama satu periode laporan.

b) Tujuan pelaporan keuangan

- (1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- (2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- (4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- (5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- (6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

c) Dasar hukum pelaporan keuangan

- (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- (2) Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
- (3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
- (4) Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah;
- (5) Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah;
- (6) Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah;
- (7) Peraturan pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah;
- (8) Peraturan pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah;
- (9) Peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
- (10) Peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah selama satu periode laporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan

efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh berbagai pihak. Pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap Pemerintah Daerah baik itu langsung maupun tidak langsung yang disebut sebagai pemakai laporan keuangan daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pengawas Keuangan, rakyat, pemerintah pusat, dan donatur.

#### **d. Nilai Informasi Laporan Keuangan**

Menurut Suwarjono (2005) nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi, maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi akan bermanfaat kalau informasi dapat dipahami dan digunakan oleh para pemakai, serta informasi juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Menurut Wahyono (2004) dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai (dapat dipahami) disini menyangkut dua elemen pokok, yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkan. Menyangkut informasi yang dihasilkan, maka informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu rumit bagi pemakai dan bernilai, dengan tidak menggunakan

istilah-istilah yang kabur serta menggunakan klasifikasi peraturan yang lazim atau berlaku. Kemudian menyangkut kemampuan sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem atau menghasilkan informasi tersebut, yang dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai dan atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya dibidang akuntansi. Disini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (dapat dipahami).

Kriteria lain nilai informasi yang dapat dipahami adalah akurat (*accurate*) dan andal. Untuk mencapai informasi yang akurat diperlukan komponen pengendalian/kontrol. Kemampuan kontrol atau pengendalian akan menjaga sistem informasi dari kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Dengan adanya komponen kontrol dapat menunjang sistem informasi menghasilkan informasi yang bernilai (keterpahaman). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriteria nilai informasi dapat dipahami/ keterpahaman tidak dapat dipisahkan dari aspek atau lingkungan pengendalian.

Menurut Suwardjono (2005), suatu informasi dikatakan mempunyai nilai bila dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pemakainya. Kebermanfaatan ini merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai, dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Adapun unsur-unsur pembentuk kualitas informasi adalah sebagai berikut:

1) Keterpahaman

Keterpahaman adalah kemampuan informasi untuk dapat dicerna maknanya oleh pemakai.

2) Keberpautan

Keberpautan atau kerelevanan adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan beberapa alternative keputusan sehingga pemakai dapat dengan mudah menentukan pilihan.

3) Nilai Prediktif

Sebagai unsur keberpautan, nilai prediktif adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam meningkatkan probabilitas bahwa harapan-harapan pemakai akan memunculkan suatu kejadian masa lalu atau yang akan terjadi. Nilai prediksi disini adalah jenis dan sifat informasi yang menjadi masukan dalam proses prediktif.

4) Nilai Balikan (*Feedback Value*)

Nilai balikan adalah kemampuan informasi untuk dijadikan basis mengevaluasi apakah keputusan-keputusan masa lalu adalah tepat dengan datangnya informasi tersebut.

5) Ketepatanwaktuan (*Timeliness*)

Ketepatanwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

6) Keterandalan (*Reability*)

Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk member keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi akan menjadi berkurang nilainya kalau orang yang menggunakan informasi meragukan kebenaran atau validitas informasi tersebut.

7) Ketepatan penyimbolan (*Representational Faithfulness*)

Ketepatan penyimbolan adalah kesesuaian atau kecocokan antara pengukur atau deskripsi (representasi) dan fenomena yang diukur atau dideskripsikan. Dalam akuntansi, fenomena yang ingin direpresentasikan adalah kondisi fisis, kondisi keuangan, dan kondisi keuangan, dan kegiatan ekonomik badan usaha berupa sumber ekonomik, kewajiban keuangan, dan transaksi atau kejadian yang mengubah sumber ekonomik dan kewajiban tersebut.

8) Keterujian (*Verifiability*)

Keterujian adalah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan yang tinggi kepada para pemakai karena tersedianya sarana bagi para pemakai untuk menguji secara independen ketepatan penyimbolan (kebenaran/validitas informasi). Dengan kata lain pengukuran yang dipilih telah diaplikasikan tanpa kesalahan atau bias.

9) Kenetralan (*Neutrality*)

Kenetralan adalah ketidakberpihakan pada grup tertentu atau ketidakbiasan dalam perlakuan akuntansi. Ketakberbiasan berarti bahwa

informasi disajikan tidak untuk mengarahkan grup pemakai tertentu agar bertindak sesuai dengan keinginan penyedia informasi atau untuk menguntungkan/merugikan grup pemakai tertentu atau untuk menghindari akibat/konsekuensi tertentu bagi sekelompok pemakai.

10) Keterbandingan (*Comparability*)

Keterbandingan adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomik.

11) Materialitas (*Materiality*)

Materialitas adalah besar kecilnya atau penghilang atau penyalahsajian informasi akuntansi yang menjadikan besar kemungkinan bahwa pertimbangan seseorang bijaksana yang mengandalkan diri pada informasi tersebut berubah atau terpengaruh oleh penghilang/pengabaian atau penyalahsajian tersebut.

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 karakteristik kualitatif informasi didefinisikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

1) Relevan.

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan

memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan penggunaannya.

Informasi yang relevan:

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat menoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

- b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- c) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

- d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.



## 2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

### a) Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang disajikan.

### b) Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

### c) Netratitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

## 3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat

dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

**d. Komponen Laporan Keuangan SKPD**

Menurut Suhandi (2007) komponen laporan keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP adalah sebagai berikut:

1) Laporan Semester (Januari-Juni)

Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya. Laporan disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat

pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama tujuh hari setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada PPKD sebagai dasar penyusunan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

## 2) Laporan Tahunan (Januari-Desember)

PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD . laporan keuangan disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan tersebut dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan tahunan SKPD tersebut terdiri dari:

a) Laporan Realisasi Anggaran

Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran pada SKPD terdiri dari pendapatan dan belanja. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Sedangkan belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

b) Neraca

Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas dana.

(1) Asset, adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan mata uang.

(2) Kewajiban, adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya menimbulkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

- (3) Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah.

c) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- (2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan.
- (3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian penting lainnya.
- (4) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

## **2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

### **a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan. Sistem pengendalian intern pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan pasal 2 PP No. 60 Tahun 2008 bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman kepada SPIP sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah Negara, keandalan pelaporan keuangan pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Mulyadi (2001) mendefinisikan pengendalian intern itu sendiri meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efesiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern ini menekankan pada tujuan yang hendak dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi (*internal accounting kontrol*) dan pengendalian intern administratif (*internal administrative kontrol*)

## **b. Unsur Pengendalian Intern**

Menurut Arens (2008) internal kontrol yang dikeluarkan *Comitte of Spoonsoring Organizations* (COSO), yaitu kerangka kerja pengendalian internal yang paling luas diterima di Amerika Serikat, menguraikan lima komponen pengendalian internal yang dirancang untuk mengimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendaliannya akan tercapai. Komponen pengendalian internal COSO meliputi hal-hal berikut:

### 1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian (*kontrol environment*) terdiri atas tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas itu. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, auditor harus mempertimbangkan subkomponen pengendalian yang paling penting terdiri dari: Integritas dan nilai-nilai etis, komitmen pada kompetensi, dewan komisaris atau komite audit, falsafah dan gaya operasi, struktur organisasi, pelimpahan wewenang dan tanggungjawab, kebijakan dan prosedur kepegawaian.

### 2) Penilaian Resiko

Penilaian resiko (*risk assessment*) atas laporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko-resiko yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai GAAP. Proses penilaian resiko adalah dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang

mempengaruhi resiko, menilai signifikan resiko dan kemungkinan terjadinya, serta menentukan tindakan yang diperlukan untuk mengelola resiko. Kategori asersi manajemen yang harus dipenuhi adalah asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa lain, asersi tentang saldo akun, dan asersi tentang penyajian dan pengungkapan.

### 3) Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian (*kontrol activities*) adalah kebijakan dan prosedur, selain yang sudah termasuk dalam empat komponen lainnya, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani resiko guna mencapai tujuan entitas. Aktivitas pengendalian umumnya dibagi menjadi lima jenis yaitu pemisahan tugas memadai, otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, dan pemeriksaan kinerja secara independent.

### 4) Informasi dan Komunikasi

Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi dari entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu serta mempertahankan akuntabilitas aktiva terkait. Sistem informasi dan komunikasi akuntansi mempunyai beberapa subkomponen, yang biasanya terdiri atas kelas-kelas transaksi. Untuk memahami perancangan sistem informasi akuntansi, auditor menentukan kelas transaksi utama entitas, bagaimana transaksi dimulai dan dicatat, catatan akuntansi apa saja yang ada serta sifatnya, bagaimana sistem itu mengungkap peristiwa-peristiwa lain yang



penting bagi laporan keuangan, sifat serta rincian proses pelaporan keuangan yang diikuti termasuk prosedur pencatatan transaksi dan penyesuaian dalam buku besar utama.

#### 5) Pemantauan.

Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Informasi yang dinilai ini berasal dari berbagai sumber, termasuk studi atas pengendalian internal yang ada, laporan auditor internal, pelaporan pengecualian tentang aktivitas pengendalian, laporan dari pembuat peraturan seperti badan pengatur bank, umpan balik dari operasional dan keluhan dari pelanggan tentang jumlah tagihan.

Sedangkan Mahmudi (2007) dalam Indriasari (2008) menyebutkan komponen penting yang terkait dengan pengendalian intern akuntansi antara lain sebagai berikut:

##### a) Sistem dan prosedur akuntansi.

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi (pasal 98 PP Nomor 58 tahun 2005): (1) sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas; (2) sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran

kas; (3) sistem dan prosedur akuntansi aset; dan (4) sistem dan prosedur akuntansi selain kas.

b) Otorisasi.

Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sangat penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di pemerintah daerah. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau walaupun ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah atau ilegal.

c) Formulir, dokumen, dan catatan.

Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan.

d) Pemisahan tugas.

Fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja. Harus

dipisahkan antara fungsi pencatat uang serta pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan tugas secara tegas dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan, dan korupsi.

Dalam PP No 60 Tahun 2008, unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Pemerintah mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi:

#### 1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Lingkungan pengendalian mencakup:

- a. Penegakan Integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelagasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

## 2. Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko terdiri atas:

- a. Identifikasi risiko;
- b. Analisis risiko.

## 3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arah pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian terdiri atas:

- a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan;
- b. Pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. Pengendalian fisik atas aset;
- e. Pemisahan fungsi;
- f. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- g. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting;
- h. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. Untuk menyelenggarakan sistem informasi yang efektif pimpinan instansi pemerintah harus:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

#### 5. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindak lanjuti. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut hasil rekomendasi audit dan reviu lainnya.

#### **c. Tujuan Pengendalian Intern**

Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarnya. Kebijakan dan prosedur ini sering kali disebut pengendalian, dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas tersebut.

Menurut Arens (2008) mengemukakan bahwa dalam merancang sistem pengendalian intern memiliki tiga tujuan umum:

1) Reliabilitas pelaporan keuangan.

Manajemen bertanggungjawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor dan pemakai lainnya. Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan keuangan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.

2) Efisiensi dan efektivitas operasi

Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakai sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan yang penting dari pengendalian intern ini adalah memperoleh informasi keuangan dan non keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.

3) Ketaatan pada hukum dan peraturan

Section 404 dari undang-undang Sarbanes Oxly mengharuskan semua perusahaan publik mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selain mematuhi ketentuan hukum, organisasi-organisasi publik, non publik, dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan.

### **3. Standar Akuntansi Pemerintahan**

#### **a. Standar Akuntansi**

Menurut Suwardjono (2005) Standar akuntansi memiliki kerangka teori konseptual yang menjadi dasar pelaksanaan teknik-tekniknya, kerangka dasar konseptual ini terdiri dari standar (teknik, prinsip) dan praktiknya yang sudah diterima oleh umum karena kegunaannya dan kelogisannya.

Standar akuntansi mencakup Konvensi, peraturan, dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi (*Standard Setting Body*) pada saat tertentu. Standar ini merupakan konsensus pada kala itu tentang pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, modal, hasil, biaya, dan perubahannya dalam bentuk laporan keuangan. Dalam standar ini dijelaskan transaksi apa yang harus dicatat; bagaimana mencatatnya, dan bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang akan disajikan.

Standar akuntansi ini merupakan masalah penting dalam profesi dan pemakai laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu, mekanisme penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan.

#### **b. Standar Akuntansi Pemerintahan**

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan

disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (2006), SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP. PSAP terdiri dari sebelas pernyataan standar:

1. PSAP No 01 tentang Penyajian laporan keuangan;
2. PSAP No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
3. PSAP No 03 tentang Laporan Arus Kas;
4. PSAP No 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
5. PASP No 05 tentang Akuntansi Persediaan;
6. PSAP No 06 tentang Akuntansi Investasi;
7. PSAP No 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
8. PSAP No 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan;



9. PSAP No 09 tentang Akuntansi Kewajiban;

10. PSAP No 10 tentang Koreksi Kesalahan;

11. PSAP No 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi.

### **c. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (2006) delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

#### **a. Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

#### **b. Prinsip Nilai Historis**

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

c. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah di otorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitas.

e. Prinsip Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal).

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna

laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*)

laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

**d. Tantangan dalam Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (2006):

1) Komitmen dari pimpinan

Dukungan kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Kejelasan perundang-undangan, mendorong penerapan akuntansi pemerintah dan memberikan dukungan yang kuat bagi para pimpinan departemen/lembaga di pusat dan gubernur/bupati/walikota di daerah.

2) Tersedianya SDM yang kompeten

Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat dan daerah kepada BPK selambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran terakhir. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. Saat ini, kebutuhan tersebut sangat terasa. Akibat tidak sejalannya dunia pendidikan dan dunia praktis pemerintah, pemborosan terjadi melalui training dan workshop.

### 3) Resistensi terhadap perubahan

Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama, akan enggan mengikuti perubahan. Untuk itu, penerapan berbagai kebijakan akuntansi pemerintahan perlu dilakukan melalui sosialisasi.

### 4) Lingkungan masyarakat

Apresiasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan dari penetapan akuntansi pemerintahan. Masyarakat perlu didorong untuk mampu memahami laporan keuangan pemerintah, sehingga dapat memahami penggunaan atas penerimaan pajak yang diperoleh dari masyarakatmaupaun pengalokasian sumber daya yang ada.

Untuk mendukung keberhasilan penerapan atas akuntansi pemerintahan dapat diperlukan strategi sebagai berikut:

#### 1) Mempertahankan memontum perubahan

Perubahan akuntansi pemerintahan yang mulai digagas dalam satu dasawarsa terakhir telah memperoleh momentum dengan diundangkannya tiga paket UU di bidang keuangan Negara dan di bidang keuangan daerah. Momentum ini perlu dipertahankan dengan secara tepat waktu menyiapkan standar akuntansi pemerintahan yang dibutuhkan dan sekaligus memberikan pelayanan terutama bagi instansi pemerintah yang baru menerapkan akuntansi pemerintahan saat ini.

2) Melakukan riset untuk mengidentifikasi kebutuhan pemakai

Perlu dilakukan dan digalakkan riset dalam akuntansi sektor publik baik oleh perguruan tinggi, instansi pemerintah, maupaun lembaga kompeten lainnya.

3) Mempermudah penerapan akuntansi pemerintahan

Penerapan akuntansi pemerintah dengan basis akuntansi menuju akrual merupakan suatu yang baru dan pasti mengundang banyak pertanyaan yang sifatnya teknis dan detil yang diatur dalam standar. Disamping itu, butir-butir standar banyak yang memerlukan interpretasi lebih lanjut. Untuk itu, komite standar perlu mengidentifikasikan kebutuhan teknis dalam penerapan akuntansi pemerintahan dan selanjutnya menuangkannya dalam bulletin teknis maupun IPSAP.

4) Mendorong keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga diklat

Sumber daya manusia yang handal merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan akuntansi pemerintahan. Untuk itu, perguruan tinggi perlu didorong untuk menyiapkan kurikulum silabus yang sesuai dengan perkembangan di bidang akuntansi pemerintahan. Dalam menyiapkan SDM, peran lembaga diklat juga sangat diperlukan untuk membangun atau meningkatkan kompetensi dari aparatur pemerintahan yang bertugas di dalam menyiapkan, menyusun dan mengaudit laporan keuangan pemerintah.

5) Meningkatkan keterlibatan profesi akuntansi

Profesi akuntansi sebagai induk dari pengembangan akuntansi pemerintahan perlu meningkatkan peran sertanya untuk mengembangkan dan mensosialisasi

penerapan akuntansi pemerintahan. Pembentukan kompartemen akuntan sektor publik merupakan suatu langkah awal yang bagus untuk mendorong keterlibatan IAI dalam pengembangan akuntansi pemerintahan.

6) Mengembangkan akuntansi berbasis akrual penuh.

Sesuai amanat UU nomor 17 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa penerapan pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual secara penuh akan diterapkan pada tahun anggaran 2008. Untuk itu, KSAP dan seluruh pihak yang terkait perlu mempersiapkan langkah-langkah tersebut.

## **B. Penelitian Relevan**

Berdasarkan beberapa laporan penelitian terdahulu, penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

Penelitian Fardila (2008), yang meneliti mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada pemerintahan kota Padang, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang secara implisit belum mampu menerapkan SAP, hal ini dapat dilihat dari banyaknya Dinas di Kota Padang yang belum selesai dalam menyusun laporan keuangan. Serta adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemko Padang, yaitu sumber daya manusia yang bukan dari akuntansi, dan kurangnya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Pemko Padang.

Harifan (2009) tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sampel penelitian ini adalah SKPD

yang terdapat di kota Padang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia mempunyai signifikansi positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

Siska (2009) yang menguji pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Dalam penelitian Siska, populasi atau responden yang digunakan yaitu para auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah baik secara parsial maupun secara simultan (bersama-sama), tetapi pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap laporan keuangan pemerintah masih lemah, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi sangat lemah.

### **C. Kerangka Konseptual**

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai informasi laporan keuangan SKPD, sedangkan variabel independennya adalah sistem pengendalian intern pemerintah dan pelaksanaan standar akuntansi pemerintah.

Informasi keuangan yang mempunyai nilai adalah informasi yang dapat dimengerti dan dimanfaatkan bagi pemakainya dalam pengambilan keputusan.

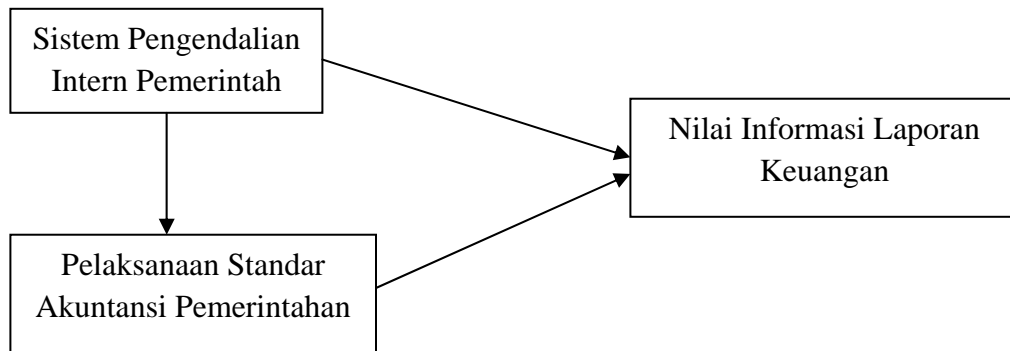
Informasi keuangan yang tersajikan dalam laporan keuangan merupakan hasil dari penerapan sistem akuntansi. Dalam usaha menciptakan informasi laporan keuangan yang baik maka diperlukan adanya pedoman dalam proses penyusunan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan suatu sistem yang dirancang sedemikian rupa baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah. Tujuan dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menciptakan keandalan dari laporan keuangan, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Semakin baik SPIP maka semakin baik pula pelaksanaan SAP.

Untuk lebih menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut, maka dibuatlah kerangka konseptual seperti yang terlihat pada gambar:





**Gambar 1**  
**Kerangka Konseptual**

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka konseptual di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh Signifikan Positif terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD
- H2 : Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh Signifikan Positif terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD
- H3 : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Informasi Keuangan SKPD melalui Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD.
2. Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD melalui Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah

#### **B. Keterbatasan dan Saran Penelitian**

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini merupakan metode survey menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data yang dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan.

2. Pilihan jawaban yang peneliti ajukan tidak mewakili semua aspirasi dari responden sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Pemerintah harus lebih optimal lagi dalam meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah dan pelaksanaan standar akuntansi pemerintah, karena dari hasil penelitian ini dan wawancara singkat pada beberapa responden diketahui bahwa belum terdapat pelatihan khusus untuk sistem akuntansi pemerintahan.
2. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika dilengkapi dengan wawancara ataupun pernyataan tertulis sehingga dapat menggali semua hal yang menjadi tujuan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aren, Alvin A. 2008. *Auditing dan jasa Assurance*. Jilid 1. Erlangga: Jakarta.
- Arikuntoro, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Publik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Darman, Siska. 2009. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Fardila, Sherly. 2008. Penerapan SAP dan Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam Penyusunan Laporan Keuangan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Forum Dosen akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Undip: Semarang.
- Harifan, Handriko. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Harnanto. 2002. *Akuntansi Keuangan Menengah*. BPFE-YOGYAKARTA: Yogyakarta
- Indriasari, Desi. 2008. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah". Pontianak: *Jurnal SNA*.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. [www.ksap.org](http://www.ksap.org)